

# ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK



#1



## ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Lakukan Pendataan Perkara Gugatan/Permohonan Perkara Perdata/Pidana/Agama/TUN secara Online
- Kirim dan terima Berkas Anda secara elektronik (Gugatan/permohonan, reply/duplik, Jawaban)\* (berlapis)



e - Filing

e - Payment

e - Summons

- Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahananya tanpa perlu datang ke Kasi melalui jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banking, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)
- Terima Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke rekening Anda.

#2

## FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN

yang lebih Cepat,  
Sederhana, Biaya  
Ringan



Segera dapatkan akun pengguna aplikasi e-Court



Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:  
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



# KEMUDAHAN BERUSAHA & PERAN MAHKAMAH AGUNG



91  
EODB 2017

72  
EODB 2018

## PERINGKAT GLOBAL

*Global Rank*



166  
EODB 2017

145  
EODB 2018

## PENEGAKAN KONTRAK

*Enforcing Contract*



76  
EODB 2017

38  
EODB 2018

## PENYELESAIAN KEPAILITAN

*Resolving Insolvency*



### INDIKATOR KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)

- STARTING A BUSINESS
- DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS
- REGISTERING PROPERTY
- GETTING ELECTRICITY
- PAYING TAXES
- GETTING CREDIT
- PROTECTING MINORITY INVESTORS
- TRADING ACROSS BORDERS
- ENFORCING CONTRACTS
- RESOLVING INSOLVENCY

## PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EODB)



### PERAN MAHKAMAH AGUNG



### SURVEY KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS SURVEY):

Survey global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC)/World Bank Group terhadap tidak kurang 180 negara di seluruh dunia. Survey dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal.



KELOMPOK KERJA  
KENIAGAAN BERUSAHA  
MAHKAMAH AGUNG RI

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

# PEMBARUAN PERADILAN

(Dalam Rangka Kemudahan Berusaha)



## KOORDINASI

SK KMA  
Nomor 043  
KMA/SK/II/2017



## PROSEDURAL

- ① Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- ② Perma No. 2/2016 Tentang Mediasi
- ③ SEMA No. 2 Tahun 2016 Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan



## TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

- ① Akses kepada Putusan seluruh Pengadilan dan Mahkamah Agung (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>)
- ② Akses kepada perkembangan penanganan perkara pada Mahkamah Agung (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>)
- ③ Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan (<http://sipp.pn-namapengadilan.go.id>)



## MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA



- ② Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan

- ③ SEMA 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali



Implementasi Sistem  
Informasi Penelusuran  
Perkara di seluruh  
Pengadilan di  
Indonesia sejak 2013